

STRATEGI PEMBELAJARAN NILAI YANG HUMANIS

Oleh:

C. Asri Budiningsih¹

Abstract

Indonesian's citizen up until now is enduring lots of crises. One of them, crisis of humanism and nationalism has not yet been overcome completely. Actually, in such situation the greatest contribution potential is possessed by the public education. The current deviation of Indonesian value is not the responsibility of religion and *PKn* (civic) courses. Values will develop automatically only if public education delivers humanistic approach. In such approach, everyone is respected as a person, as a human being in the real definitions. Humanism meant as a solidarity principle between human beings in any physical or psychological conditions. It is an ability to visualize and emphasize the others' condition without considering the primordial and social status.

Humanism requires the existence of the educational department which could maintain the conducive human's relationship and respect every person, makes people feel safe hence they are no longer afraid of being threatened in terms of their personal identity and uniqueness. A humanist educational institution has a certain frame of rules and an inclusive constitutional. The rules would not rely on perspectives of certain communities or groups yet accepted by all members of every community or group as institution members, so that everyone would feel safe and free from any threat in terms of personal identity and uniqueness. Humanist learning strategy is developed in order to achieve trans-primordial humanity in the form of ability to respect personal values, solidarity and human's right regardless of the personal race, birthplace, religion, nation or anything.

Keywords: instructional, value, humanism

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia hingga kini masih berada dalam berbagai krisis, seperti krisis ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, bahkan ideologi dan kebangsaan. Kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dengan merebaknya isu-isu moral dan nilai-nilai kehidupan di kalangan remaja seperti penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba), pornografi, perkosaan, merusak milik orang lain, perampasan, penipuan, pengguguran kandungan, penganiayaan, perjudian, pelacuran, pembunuhan, dan lain-lain, sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat

¹ Dr. C. Asri Budiningsih adalah Dosen Jurusan Kurikulum & Teknologi Pendidikan FIP UNY

ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan kriminal. Keadaan ini sangat memprihatinkan masyarakat khususnya para orang tua dan para guru, sebab pelaku-pelaku beserta korbannya adalah kaum remaja, terutama para pelajar dan mahasiswa.

Masalah disintegrasi bangsa yang juga mulai menggejala harus mendapatkan perhatian sungguh karena akan menentukan nasib dan masa depan generasi muda serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Persoalan bangsa akibat dari pertikaian antar umat beragama perlu diwaspadai. Heterogenitas dan kemajemukan bangsa Indonesia dalam segala segi, maka hubungan antar umat penting sebagai usaha preventif munculnya kerusuhan dan tindak kekerasan. Perlu upaya perdamaian, pembinaan, kondisi dan fasilitas, agar tercipta budaya damai, menghargai hak asasi manusia dan kemerdekaan setiap pribadi, tetapi juga menjamin semakin kuatnya ikatan-ikatan sosial.

Menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengajarkan kepada kaum muda nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan akhlak mulia, serta mengembangkan keimanan dan rasa kebangsaan agar kaum muda tidak terkotak-kotak dan saling bertentangan yang dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Perlu penyadaran bagi para guru, bahwa selama ini strategi pembelajaran yang dilakukan di kelas-kelas terkesan lebih sebagai misi penerusan informasi (Raka Joni, 2007) bukan sebagai pembentukan pribadi. Tema-tema yang dipelajari terhenti pada pengenalan koqnitif, belum sampai pada pengembangan diri dalam perilaku dan kemampuan-kemampuan afektif. Pesan yang disajikan kurang bermakna, siswa tidak dibimbing pada pola belajar anak melainkan dipaksa belajar menggunakan pola pikir orang dewasa.

Pendidikan nilai kebangsaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan turut menentukan keberhasilan upaya mengatasi masalah-masalah tersebut. Jika semangat kesatuan dan persatuan mulai memudar dan tekad kebersamaan tidak lagi dirasakan, maka yang ada hanyalah kelompok-kelompok yang berdasarkan kedaerahan, suku, agama yang berbeda-beda yang bersifat eksklusif dan fanatik, dan hanya mampu menghayati komunitas dan golongannya sendiri. Rasa kebangsaan terancam dari sudut primordialisme dan keseragaman yang tidak menghormati pluralitas masyarakat sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Furnivall bahwa masyarakat-masyarakat plural Asia Tenggara khususnya Indonesia akan

terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Azyumardi Azra, 2007).

Kondisi penuh gejolak dan kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini patut dipikirkan upaya-upaya perdamaian dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Setiap orang dengan teguh mau dan mampu terlibat membangun masyarakat persaudaraan yang semakin luas dan inklusif. Menolak setiap tindak kekerasan, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Diperlukan pembinaan, kondisi dan fasilitas agar tercipta budaya damai, menghormati hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan, menghargai setiap pribadi, tetapi juga untuk menjamin semakin kuatnya ikatan-ikatan sosial, karena setiap orang harus memperhatikan sesamanya tanpa diskriminasi.

Untuk itu, merupakan kebutuhan mendesak mengajarkan kepada kaum muda nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan akhlak mulia yang amat penting bagi kehidupan pribadi dan komunitasnya. Perlu upaya mengembangkan kecerdasan spiritual dan nilai-nilai kebangsaan, agar kaum muda tidak terkotak-kotak dalam budaya dan agama yang saling bertentangan, yang dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Azyumardi Azra (2007) harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, dan berkesinambungan pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan baik formal, non formal, bahkan informal dalam masyarakat luas.

Peranan Pendidikan

Sebagaimana diketahui bahwa krisis kemanusiaan dan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia hingga kini belum dapat diatasi secara tuntas. Kondisi demikian diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar kontribusinya terhadap situasi ini. Mereka yang telah melewati sistem pendidikan selama ini, mulai dari pendidikan dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan pendidikan persekolahan, kurang memiliki pedoman perilaku dan nilai-nilai kehidupan yang memadai, serta kemampuan mengelola konflik dan kekacauan, sehingga anak-anak muda dan remaja selalu menjadi korban konflik serta kekacauan.

Di lingkungan pendidikan persekolahan, terjadinya penyimpangan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran agama dan PKn, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh mata pelajaran di sekolah. Jika

pendidikan nilai hanya dibebankan kepada guru agama, maka nilai-nilai kemanusiaan yang tumbuh hanya sebatas hafalan tentang doktrin-doktrin agama. Pengetahuan tentang doktrin-doktrin agama tidak menjamin tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diandalkan. Demikian juga dengan pelajaran PKn, perlu dipahami bahwa nilai kebangsaan adalah suatu sikap batin yang mengandung rasa cinta kepada bangsa, kebanggaan, solidaritas bangsa, rasa turut bertanggungjawab atas nasib bangsa dan ikut menderita jika bangsa menderita.

Nilai-nilai di atas akan berkembang jika pendidikan bersifat humanis. Oleh sebab itu, untuk menciptakan pendidikan yang humanis diperlukan instrumen yang memadai dan keterlibatan seluruh civitas akademika pada lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pandangan Humanisme dalam Pendidikan Nilai

Humanisme harus dipahami sebagai suatu keyakinan etis yang secara langsung mengandung sikap etis praktis yang sesuai, yaitu suatu keyakinan bahwa setiap orang harus dihormati sebagai persona, sebagai manusia dalam arti sepenuhnya. Setiap orang dihormati tidak karena ia pintar atau bodoh, baik atau buruk, dari mana daerah asal-usulnya, komunitas etnik atau umat beragama mana, dan apakah ia seorang laki-laki atau perempuan. Humanisme berarti menghormati orang lain dalam identitas personalnya, dengan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, cita-cita, ketakutan-ketakutan dan kebutuhan-kebutuhannya.

Humanisme berarti suatu pandangan atau perspektif dimana hormat dasar yang diberikan kepada orang lain tidak tergantung dari ciri-ciri atau kemampuan-kemampuannya, melainkan semata-mata dari kenyataan bahwa dia adalah seorang manusia. Oleh sebab itu, tindakan yang buruk atau kejahatan terhadap orang lain merupakan kekejaman yang jauh dari nilai humanis. Tidak bersikap kejam berarti tidak pernah membuat orang lain merasa sakit, dengan tidak melukai orang lain secara fisik maupun merendharkannya secara psikis. Yang penting bagi seorang humanis adalah tidak perlu ada alasan teoretis untuk tidak bersikap kejam (Magnis-Suseno, 2001).

Humanisme juga diartikan sebagai solidaritas berprinsip dengan orang lain apapun kondisi orang tersebut, dan bahwa orang lain mudah terluka. Suatu kemampuan untuk melihat dan merasakan kondisi orang lain tanpa memandang sekat-sekat primordial dan sosialnya. Penolakan terhadap ketidakadilan, *fairness* dan cinta keadilan adalah sikap berprinsip yang

mewarnai seseorang dalam seluruh dimensi hidupnya. Ini berarti, humanisme tidak terikat pada batas-batas ideologi, agama atau legitimasi-legitimasi teoritis lain (Magnis-Suseno, 2001).

Magnis-Suseno menggambarkan pribadi yang humanis adalah pribadi yang memiliki sikap-sikap tahu diri, bijaksana, bertolak dari keterbatasannya maka mengambil sikap yang wajar, terbuka, dan melihat berbagai kemungkinan. Bersikap positif terhadap sesama, tidak terhalang oleh kepicikan primordialisme, suku, bangsa, agama, etnik, warna kulit, dan lain-lain. Ia anti kepicikan, fanatisme, kekerasan, penilaian-penilaian mutlak, tidak mudah mengutuk pandangan orang lain. Sebaliknya, ia bersikap terbuka, toleran, mampu menghormati keyakinan orang lain termasuk jika ia tidak menyetujuinya, dan mampu melihat yang positif di balik perbedaan.

Di tingkat institusi-institusi, humanisme menuntut terciptanya lembaga-lembaga yang menjaga dan menghormati sikap-sikap di atas. Aspek-aspek penting yang perlu diciptakan dalam institusi-institusi kelembagaan yang humanis adalah; 1) menjunjung persamaan hak dan hak-hak asasi manusia, 2) sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang tanpa diskriminasi memiliki akses ke jaminan hukum yang sama dan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, 3) sebuah kerangka hukum dan politik yang terarah pada pencapaian keadilan sosial, solidaritas bagi anggota-anggota masyarakat yang paling lemah. Dengan ungkapan lain, institusi yang humanis memiliki kerangka hukum atau aturan serta konstitusional yang inklusif, yang tidak berdasarkan pada pandangan satu golongan atau kelompok saja, melainkan yang dapat diterima oleh semua golongan atau kelompok sebagai anggota institusi, sehingga mereka merasa sejahtera tanpa takut terancam identitas dan kekhasan masing-masing.

Belajar Menurut Teori Humanistik

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi, dari pada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, manusia yang humanis, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan ungkapan lain, teori ini lebih tertarik

pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal dari pada pemahaman tentang proses belajar sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya.

Pembelajaran yang dikembangkan berpijak pada teori belajar humanistik memiliki ciri-ciri humanis yaitu untuk mencapai kemanusiaan transprimordial berupa kemampuan untuk menghormati martabat, keutuhan dan hak-hak asasi sesama manusia tidak pandang apakah ia termasuk golongan primordial suku, daerah, agama, bangsa sendiri atau lainnya. Diantara nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran adalah kemampuan untuk menerima pluralisme, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dan tak tertekan dalam persaudaraan dari budaya, adat-istiadat, agama, dan gaya hidup yang berbeda. Sikap toleran dan *fairness* yaitu kesediaan untuk mengukur orang lain dengan ukuran yang dipakai bagi dirinya sendiri, serta untuk mengukur diri sendiri dengan ukuran yang digunakan untuk mengukur orang lain. Menghindari pemecahan konflik dengan cara kekerasan dan berupaya untuk bersikap lebih santun.

Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel. Pandangannya tentang belajar bermakna atau "*Meaningful Learning*" yang juga tergolong dalam aliran kognitif, mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Nilai-nilai kehidupan yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si belajar, maka tidak akan terjadi asimilasi sikap dan nilai-nilai baru ke dalam struktur kognitif serta kepribadian yang telah dimilikinya. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar sebagai manusia yang transprimordial secara optimal.

Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia secara transprimordial. Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat eklektik. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan ada pula kelemahannya. Dalam arti ini eklektisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya. Teori humanistik akan

memanfaatkan teori-teori apapun, asal tujuannya tercapai yaitu menjadikan manusia transprimordial.

Manusia adalah makhluk yang kompleks. Banyak ahli di dalam menyusun teorinya hanya terpukau pada aspek tertentu yang sedang menjadi pusat perhatiannya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu setiap ahli melakukan penelitiannya dari sudut pandangnya masing-masing dan menganggap bahwa keterangannya tentang bagaimana manusia itu belajar adalah sebagai keterangan yang paling memadai. Maka akan terdapat berbagai teori tentang belajar sesuai dengan pandangan masing-masing.

Dari penalaran di atas ternyata bahwa perbedaan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain sering kali hanya timbul karena perbedaan sudut pandangan semata, atau kadang-kadang hanya perbedaan aksentuasi. Jadi keterangan atau pandangan yang berbeda-beda itu hanyalah keterangan mengenai hal yang satu dan sama dipandang dari sudut yang berlainan. Dengan demikian teori humanistik dengan pandangannya yang eklektik yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan untuk memanusiakan manusia yang transprimordial bukan saja mungkin untuk dilakukan, tetapi justru harus dilakukan.

Strategi Pembelajaran Nilai yang Humanis

Pendidikan nilai yang selama ini dilakukan menganggap bahwa setiap orang dewasa dapat menjadi pendidik nilai (Eyre & Eyre, 1993). Anak dan remaja dengan cara indoktrinasi dibawa menuju kepada kedewasaan seperti yang dikehendaki oleh orang-orang dewasa. Tujuan pembelajaran (jika meminjam taksonomi Bloom) tidak sampai pada aspek penalaran atau penilaian. Akibatnya anak dapat melaksanakan nilai-nilai yang dikehendaki oleh orang dewasa, tetapi tidak memahami alasannya. Mereka dapat menghafalkan tetapi tidak mengerti maknanya. Cara demikian tidak menghormati anak sebagai subyek nilai, sehingga yang terbentuk adalah nilai-nilai heteronom dan bukan nilai-nilai yang otonom.

Hal serupa diperkuat oleh hasil studi (Depdikbud, 1978) yang mengatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan nilai masyarakat terkena oleh batasan prinsip-prinsip keselarasan sosial, sebagai ciri khas pertimbangan tingkat konvensional (Kohlberg, 1980). Argumentasi-argumentasi prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan bahkan suara hati seseorang harus

memperhatikan tuntutan prinsip keselarasan masyarakat tersebut. Individu tidak dapat bertindak hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri semata.

Sebagaimana juga dijelaskan oleh Hardiman (1991), bahwa masyarakat dan keluarga telah memiliki nilai-nilai yang harus diikuti oleh generasi muda. Dalam menanamkan nilai-nilai tersebut digunakan cara instruktif, ceramah, nasehat, hukuman edukatif dan kadang-kadang diskusi. Cara transmisi kultural demikian hanya memberikan “paket nilai-nilai” seperti jadilah warga negara yang baik, belajarlah dengan rajin, bersikaplah tenggang rasa, berbuatlah sopan, dan lain-lain. Cara demikian bukan hanya dapat dipertanyakan “isi” kebenarannya, tetapi juga sangat jarang ada guru atau orang dewasa yang dapat mengajarkannya secara tepat dengan menghadapi anak dan remaja sebagai subyek nilai yang rasional.

Mestinya para pendidik mengembangkan struktur kognitif yang telah ada dalam diri anak dan bukan sebagai upaya mengisi atau mentransfer begitu saja nilai-nilai. Guru atau orang tua tidak dapat memaksakan nilai-nilai kepada anak dan remaja. Merekalah yang aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan sistem nilai yang diyakininya (Freire, 1984; Cremers, 1995). Selama ini guru atau orang tua dalam mendidik anak terkesan kurang memperhatikan faktor kognitif anak dan bahwa faktor ini berkembang secara bertahap.

Penelitian Blatt memperlihatkan bahwa penggunaan prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru, dapat meningkatkan perilaku dan sikap anak secara berarti dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Prosedur yang dimaksud mengandalkan pada induksi konflik kognitif mengenai masalah-masalah nilai-nilai kehidupan, dan keterbukaan terhadap tahap berpikir yang berada langsung di atas tahap berpikir anak itu sendiri.

Penggunaan strategi pembelajaran untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan /atau kebangsaan, pemilihan materi pembelajaran supaya dipusatkan pada suatu rangkaian masalah-masalah kemanusiaan yang harus didiskusikan bersama antara guru dan siswa. Masalah-masalah tersebut dipilih untuk menimbulkan konflik-konflik kognitif, yakni rasa tidak puas mengenai apa yang benar dan menimbulkan perbedaan pendapat yang merangsang aktifitas berfikir di antara siswa. Guru menciptakan diskusi di antara siswa pada tingkat kemampuan yang berbeda. Guru mendukung dan menjelaskan argumen-argumen yang dikemukakan oleh siswa, kemudian menjelaskan argumentasi yang berada satu tahap lebih baik. Guru menantang dengan

menggunakan situasi-situasi baru dan menjelaskan semua argumen dari satu tahap yang melampaui tahap sebelumnya, demikian seterusnya.

Mengembangkan kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik, perasaan mencintai akan kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari sikap nilai yang perlu difasilitasi oleh guru. Perasaan kemanusiaan ini akan sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, perasaan kemanusiaan perlu diajarkan dan dikembangkan kepada generasi muda dengan memupuk perkembangan hati nurani dan sikap empati. Kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan kemanusiaan ke dalam perilaku-perilaku nyata perlu dimunculkan dan dikembangkan dalam kehidupan bersama sehari-hari.

Di Sekolah, pendekatan humanisme menuntut terciptanya iklim pembelajaran yang menghormati dan menjunjung persamaan hak, peraturan yang menjamin bahwa setiap siswa tanpa diskriminasi memiliki akses ke jaminan hukum yang sama dan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, ada upaya terarah pada pencapaian keadilan sosial, solidaritas bagi anggota-anggota masyarakat sekolah yang paling lemah. Dengan ungkapan lain, institusi pendidikan yang humanis memiliki kerangka aturan serta konstitusional yang inklusif, yang tidak berdasarkan pada pandangan satu golongan atau kelompok saja, melainkan yang dapat diterima oleh semua anggota dari golongan atau kelompok manapun sebagai anggota institusi, sehingga mereka merasa sejahtera tanpa takut terancam identitas dan kekhasan masing-masing.

Peranan guru sebagai fasilitator untuk membantu siswa mempertimbangkan berbagai konflik kemanusiaan, melihat inkonsistensi dan ketidaksesuaian cara berfikir dalam mengatasi masalah-masalah nilai-nilai kemanusiaan. Guru yang humanis memiliki sikap tahu diri, bijaksana, bertolak dari keterbatasannya maka mengambil sikap yang wajar, terbuka, melihat berbagai kemungkinan. Bersikap positif terhadap siswa, tidak terhalang oleh kepicikan primordialisme, suku, bangsa, agama, etnik, warna kulit, dan lain-lain. Ia anti kepicikan, fanatisme, kekerasan, penilaian-penilaian mutlak, tidak mudah mengutuk pandangan siswa. Sebaliknya, ia bersikap terbuka, toleran, mampu menghormati keyakinan siswa walaupun ia sendiri kurang menyetujuinya, serta mampu melihat yang positif di balik perbedaan.

Pendidikan nilai yang humanis akan tercipta jika sekolah memfasilitasi tindakan-tindakan kemanusiaan secara nyata bagi seluruh warganya. Program ini dapat dilakukan secara terjadwal, misalnya dalam semester, bulanan, maupun mingguan. Tercapainya misi pendidikan demikian berkaitan erat dengan kurikulum, penyediaan sarana, buku teks, media/sumber belajar dan

pendekatan pembelajaran. Kurikulum formal dijabarkan ke dalam kurikulum instruksional berupa seperangkat skenario pembelajaran pada jam-jam pertemuan sebagai bentuk implementasi kurikulum. Interaksi pembelajaran yang tergelar dalam sesi-sesi pembelajaran sebagai kurikulum eksperiensial berkaitan dengan apa yang dikerjakan guru, apa yang dikerjakan siswa, dan bagaimana interaksi keduanya. Pengalaman belajar tidak sebatas mengacu pada GBPP, namun lebih pada proses keterbentukan berbagai pengetahuan, kemampuan, sikap dan nilai yang tersurat dan tersirat sebagai tujuan utuh pendidikan (R. Joni, 2007). Perspektif perkembangan siswa penting sebagai kerangka pikir pembelajaran (*developmentally appropriate practice*) (Gardner, 1995; R. Joni, 2007).

Untuk itu, pembelajaran semestinya dilakukan sesuai dengan taraf perkembangan siswa dengan menggunakan pendekatan induktif-konstruktivistik. Strategi pembelajaran *integrated learning, cooperative learning*, pembelajaran berpijak pada konsep awal siswa, melalui penilaian portofolio, melakukan refleksi, semua ini sangat dianjurkan dalam strategi pembelajaran yang humanis. Pembelajaran demikian disamping mampu mencapai tujuan pembelajaran (*insructional effects*), tujuan ikutan (*nurturants effects*) yang berupa pengembangan nilai juga dapat dicapai (Joyce & Weil, 1992).

Penutup

Merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mengajarkan kepada kaum muda nilai-nilai fundamental kemanusiaan, kebangsaan dan persatuan yang amat penting bagi kehidupan pribadi serta komunitas berbangsa dan bernegara, agar kaum muda tidak terkotak-kotak dalam budaya dan agama yang saling bertentangan yang dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa. Menurut Azyumardi Azra (2007) harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated*, dan berkesinambungan pendidikan multikul-tural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan baik formal, non formal, bahkan informal dalam masyarakat luas.

Diperlukan institusi pendidikan yang humanis yang memiliki kerangka aturan serta konstitusional inklusif, tidak berdasarkan pada pandangan satu golongan atau kelompok saja, melainkan yang dapat diterima oleh semua anggota dan sivitas akademika dari golongan atau kelompok manapun sebagai anggota institusi, sehingga mereka merasa sejahtera tanpa takut terancam identitas dan kekhasannya masing-masing.

Strategi pembelajaran yang humanis dikembangkan dan dilakukan agar tercapai kemanusiaan transprimordial berupa kemampuan untuk menghormati martabat, keutuhan dan hak-hak asasi manusia tidak pandang apakah ia termasuk golongan primordial suku, daerah, agama, bangsa sendiri atau lainnya. Materi pembelajaran dipusatkan pada suatu rangkaian masalah kemanusiaan yang harus didiskusikan bersama antara guru dan siswa. Masalah-masalah tersebut dipilih untuk menimbulkan konflik-konflik kognitif, yakni rasa tidak puas mengenai apa yang benar dan menimbulkan perbedaan pendapat yang merangsang berfikir di antara siswa. Guru menciptakan diskusi di antara siswa pada tingkat kemampuan yang berbeda. Guru mendukung dan menjelaskan argumen-argumen yang dikemukakan oleh siswa, kemudian menjelaskan argumentasi yang berada satu tahap lebih baik. Guru menantang dengan menggunakan situasi-situasi baru dan menjelaskan semua argumen dari satu tahap yang melampaui tahap sebelumnya, demikian seterusnya.

Perasaan mencintai akan kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari sikap nilai yang perlu difasilitasi oleh guru. Kemampuan untuk melakukan keputusan serta perasaan kemanusiaan dan kebangsaan ke dalam perilaku-perilaku nyata perlu dimunculkan dan dikembangkan dalam kehidupan bersama sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Asri Budiningsih, C., dkk., 2001. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Tahap Penalaran Moral Remaja: Analisis karakteristik siswa SLTP dan SMU di Jawa*. DCRG, Proyek Penelitian Untuk Pengembangan Pascasarjana/URGE. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikti.
- , 2003. *Pembelajaran Moral Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- , 2004. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Azyumardi Azra, 2007. *Merawat kemajemukan merawat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Buchori, M., 2002. *Revitalisasi Pendidikan Moral Dalam Menghadapi Tantangan Jaman*. Makalah Dies Natalis ke 47 FIP – UNY. Yogyakarta: FIP UNY
- Cohen, D. & Strayer, J. 1996. *Empathy in Conduct Disordered and Comparison Youth*. Journal of Developmental Psychology, 32
- Cremers, A. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

- Gardner, Howard. 1995. *The unschooled mind: how children think and how schools should teach*.
- Duska, R. & Whelan, M. 1975. *Moral Development: A Guide to Piaget and Kohlberg*. New York: Paulist Press.
- Gagne, E.D. 1985. *The Cognitive Psychology of School Learning*. Boston, Toronto: Liitle, Brown and Company.
- Gazda, G.M.; Asbury, F.R.; Balzer, F.J.; Childers, W.C.; Walters, R.P. 1991. *Human Relations Development: A Manual for Educators* (4th ed.) Boston: Allyn & Bacon.
- Hardiman, B. 1987. *Pendidikan Moral Sebagai Pendidikan Keadilan*. Yogyakarta: Basis "Andi Offset".
- Kohlberg, L. 1980. Stages of Moral Development as a Basis of Moral Education. Dalam Mursey, B. (Ed.), *Moral Development, Moral Education, and Kohlberg*. Brimingham, Alabama: Religious Education Press.
- Magnis-Suseno, F. 1991. *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- . 2001. *Kebangsaan yang humanis*. Makalah Semnas. Yogyakarta: USD
- Newcomb, T.M, Ralph, H.T. dan Philip, E.C. 1989. *Social Psychology: The Studi of Human Interaction*. New York: Holt, Rinerhart and Winston.
- Paul Suparno, dkk. 2002. *Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Raka Joni, T., 2007. *Prospek pendidikan profesional guru di bawah naungan UU No 14 Tahun 2005*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Joyce Bruce; Weil Marsha. 1992. *Models of teaching*. London: Allyn and Bacon.